



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2023 – 2024 |
| Masa Persidangan | : V |
| Rapat Ke- | : 13 |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari/Tanggal | : Senin, 10 Juni 2024 |
| Waktu | : Pukul 13.00 WIB s.d Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta |
| Acara | : 1. Evaluasi Pj Kepala Daerah; 2. Rencana Desain Besar Penataan Daerah; 3. Dan lain-lain. |
| Ketua Rapat | : Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P. /Wakil Ketua Komisi II DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI |
| Hadir | : A. 21 (dua puluh satu) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri |

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, dengan agenda evaluasi Pj Kepala Daerah, Rencana Desain Besar Penataan Daerah, dan lain-lain, pada hari Senin, 10 Juni 2024, dibuka pukul 15.10 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, dengan agenda evaluasi Pj Kepala Daerah, Rencana Desain Besar Penataan Daerah, dan lain-lain, sebagai berikut:

1. Resume Proses Peradilan terkait Eksistensi Kebijakan Penjabat Kepala Daerah:
 - a. Gugatan di PTUN Jakarta dalam perkara Nomor 394/G/TF/2022/PTUN.JKT dan Nomor 422/G/TF/2022/PYUN.JKT yang amar kedua putusan perkara tersebut adalah ditolak, atas putusan tersebut Pemohon/Penggugat mengajukan upaya hukum banding, yang saat ini dalam proses pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. Penggugat Perkara 422: Adhito Harinugroho, Gustika Fardani Jusuf, Lilik Sulisty, Suci Fitriah Tanjung, Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi). Penggugat Perkara 394: YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)).
 - b. Upaya pengaduan tindakan maladministrasi ke Ombudsman Republik Indonesia dengan LAHP Ombudsman RI Nomor 0583/LM/VI/2022/JKT tanggal 19 Juli 2022, dan telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri dengan surat Nomor 180/4435/SJ tanggal 1 Agustus 2022 Hal Tanggapan LAHP Ombudsman RI Nomor 0583/LM/VI/2022/JKT, yang pada intinya tanggapan Kementerian Dalam Negeri telah diterima dan dipahami Ombudsman RI. Pengadu: ICW (Indonesia Corruption Watch).
 - c. Sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan perkara Nomor 007/II/KIP-PS-A/2023 yang telah diputus pada tanggal 27 Juli 2023, amar putusannya menyatakan mengabulkan Sebagian permohonan Pemohon, yaitu terhadap aturan yang bersifat umum. Terhadap putusan KIP, Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan eksekusi atas putusan tersebut. Pemohon: ICW (Indonesia Corruption Watch).
 - d. Bahwa terhadap upaya yang di tempuh oleh Pemohon, Kementerian Dalam Negeri telah menanggapi sesuai dengan prosedur dan hukum acara secara objektif dan maksimal disertai bukti-bukti dan keterangan ahli yang kompeten.
 - e. Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dengan seksama seluruh dokumen litigasi, bukti-bukti keterangan saksi dan ahli, dengan demikian analisis yuridis dapat dikategorikan komprehensif.
2. Tindak Lanjut Kemendagri dalam Penyusunan Revisi Kajian Desartada:
 - a. Rapat di Kota Makassar pada tanggal 26-28 September 2022, dengan salah satu hasil beberapa nama pakar sebagai narasumber pada rapat-rapat penyusunan kebijakan Desartada.
 - b. Rapat Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Adwil pada tanggal 29 Mei 2023 bertempat di Flexible Working Space Ditjen Bina Adwil Gedung H Lantai 6. Rapat membahas persiapan penyusunan konsep rancangan penataan daerah tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

- c. Telah ditetapkan Kepmendagri No. 100.2.2.6-1118 Tahun 2023 tentang Tim Perumus Desain Besar Penataan Daerah (Desartada).
- d. Rapat Penyusunan Kebijakan Desartada pada tanggal 10 Agustus 2023, dengan anggota Tim Perumus dan komponen internal Kemendagri dan dilanjutkan dengan rapat-rapat lainnya.
- e. Rapat Penyusunan Kebijakan Desartada Lintas Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian tanggal 24 Agustus 2023 dengan melibatkan Kemensetneg, Kemenhan, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemen PPN/Bappenas, Kemen ATR/BPN, Kemendes PDTT, BIG, BNPP, dan BRIN.
- f. Rapat Rekomendasi DPOD Bidang Pemerintahan tanggal 29 Agustus 2023 dengan melibatkan Kemenhan, Kemenkumham, Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, dan Setkab. serta mengundang Pemerintah Provinsi Sumsel, Kepri, Jabar, NTB, Sulsel.
- g. Rapat Konsolidasi Penyusunan Kebijakan Desartada Wilayah Barat di Provinsi DIY tanggal 23-26 Oktober 2023 dengan mengundang Pakar dari PTN di Aceh, Provinsi Sumbar, Kepri, Jabar, DIY, Jatim. Dilanjutkan dengan Rapat serupa di Wilayah Timur di Provinsi Bali tanggal 22-24 November 2023 dengan mengundang pakar dari PTN di Provinsi Bali, NTT, Kalsel, Sulteng, Sulsel, Maluku dan Papua Barat.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, dengan agenda evaluasi Pj Kepala Daerah, Rencana Desain Besar Penataan Daerah, dan lain-lain, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan Evaluasi secara menyeluruh terhadap semua Penjabat (PJ) Kepala Daerah yang saat ini menjabat dengan tolak ukur berbasis pada indikator penilaian capaian Kinerja, Kemajuan daerah, Kapasitas dan Integritas serta dapat menjalankan azas-azas pemerintahan yang baik serta memberikan pertanggungjawaban atas jabatan tersebut kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
2. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri agar pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah berikutnya yang akan menjabat hingga dilantiknya Gubernur/Bupati/Walikota definitif hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024, dilaksanakan secara selektif dalam proses pengusulan, pengisian, penetapan dan penempatan Penjabat Kepala Daerah yang baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk sesegera mungkin menyusun desain besar penataan daerah sebagaimana amanat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Terkait dengan evaluasi 4 (empat) Daerah Otonomi Baru (DOB) daerah Provinsi di Wilayah Papua, Komisi II DPR RI segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) daerah Provinsi di wilayah Papua.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.32 WIB

Jakarta, 10 Juni 2024

KETUA RAPAT

Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.

A-142